P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

# DETERMINAN PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM ALOKASI DANA DESA

**Devina Dian Falisa[1)] , Siska Aprianti [2)] , Sarikadarwati [3)]**
[1] Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
email: devinadianfalisa@gmai.com[1)]

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kompetensi aparatur desa, moralitas pegawai, sistem pengendalian internal, dan budaya organisasi memengaruhi upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, yang mencakup 13 desa pada tahun 2025. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampling jenuh, sedangkan data primer dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 26. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa secara parsial, kompetensi aparatur desa serta sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap pencegahan kecurangan, sedangkan moralitas aparatur dan budaya organisasi menunjukkan pengaruh positif signifikan. Secara simultan, keempat variabel tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi positif signifikan terhadap upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa sejumlah 69,9%.

***Kata Kunci:*** *pencegahan fraud pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur desa, moralitas aparatur, sistem pengedalian internal, budaya organisasi*

***Abstract***

*This study aims to examine the extent to which village apparatus competence, employee morality, internal control systems, and organizational culture influence fraud prevention efforts in the management of village funds in Gunung Megang District, Muara Enim Regency, covering 13 villages in 2025. The sampling was conducted using a saturated sampling technique, while the primary data were collected through questionnaires. Data analysis was performed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 26. The research findings indicate that, partially, village apparatus competence and internal control systems have a significant negative effect on fraud prevention, whereas apparatus morality and organizational culture have a significant positive effect. Simultaneously, these four variables together contribute a significant positive impact of 69.9% toward fraud prevention in the management of village funds.*

***Keywords:*** *prevention of village fund management fraud, the competence of village apparatus, the morality of the apparatus, internal control systems, organizational culture*

## 1. PENDAHULUAN

pemerintah pusat mendistribusikan dana ke pemerintah daerah melalui APBN, dana tersebut akhirnya sampai ke desa-desa melalui APBD di masing-masing kabupaten atau kota. Pemerintahan desa, pelayanan publik, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kehidupan sosial kemasyarakatan, semuanya mendapat manfaat dari dana tersebut. Dimulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 6/2014 mengatur administrasi keuangan desa. Peraturan ini mencakup berbagai peraturan yang berkaitan dengan penggunaan dana tersebut. Pengelolaan keuangan desa harus mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan dan tanggung jawab untuk menuntut akuntabilitas dari pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pemanfaatan dana tersebut. Kepala Desa adalah pengambil keputusan utama dalam perencanaan dan penganggaran desa (PKPKD), sedangkan Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Seksi (Kasi) adalah perangkat desa yang bertugas menjalankan operasional sehari-hari dalam pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa secara teknis dan administratif

juga berada di bawah tanggung jawab mereka. Tanpa manajemen yang kompeten dan diawasi dengan baik, dana yang cukup besar yang dialokasikan ke desa dapat dengan mudah dicuri, terutama jika ada oknum yang mengambil keuntungan dari posisi kekuasaannya (Widyawati, Sujana, and Yuniarta 2019).

Apabila individu bertindak secara tidak jujur dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi melalui cara yang melanggar hukum, maka tindakan tersebut tergolong sebagai kecurangan. Mengabaikan peraturan yang berkaitan dengan aturan hukum berada di bawah payung kegiatan ilegal seperti penipuan. Melanggar hukum dan standar etika tidak pernah menjadi pilihan ketika satu-satunya motivasi seseorang adalah untuk memuaskan keinginannya sendiri. Ketika seseorang bertindak dengan cara yang bertentangan dengan standar sosial, mereka melakukan penipuan, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum. Tiga komponen utama dari teori segitiga kecurangan-tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi-membantu menjelaskan mengapa orang-orang tertentu terlibat dalam perilaku tersebut.

Korupsi Merupakan salah satu permasalahan mendasar dalam tata kelola pemerintah di Indonesia. Berdasarkan laporan *Indonesia Coruruption Watch* (ICW) tahun 2023, sektor pemerintah desa tercatat sebagai penyumbang kasus korupsi tertinggi dengan 187 kasus dan total kerugian negara mencapai Rp162,2 miliar. Sejak dana desa mulai didistribiusikan pada tahun 2015, jumlah kasus penyalahgunaan dana desa terus meningkat secara signifikan. Kondisi ini menunjukan masih lemahnya sistem pengawasan dan integritas aparatur desa dalam mengelola dana publik

Hasil temuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada rentang waktu 2019–2024 juga terdapat sinyal bahwa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas Pengelolaan dana desa masih kurang optimal dalam pelaksanaannya. Beberapa insiden penyalahgunaan dana desa telah tercatat, termasuk dua kasus yang berlangsung di Kabupaten Muara Enim.

Insiden berlangsung di Desa Kuripan Selatan, yang terletak di Kecamatan Empat Petulai Dangku yang melibatkan mantan Kepala Desa. Diduga, selama periode 2016–2021, pelaku menggelapkan dana desa untuk kepentingan pribadi melalui praktik laporan fiktif, manipulasi data, dan tidak menyetorkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Berdasarkan hasil audit dari Inspektorat, nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp570 juta (Indonesia 2025).

Menurut (Dewi 2017), salah satu langkah pencegahan terhadap praktik kecurangan (fraud) adalah dengan memperkuat sistem pengendalian internal, terutama pada aspek struktur organisasi maupun mekanismenya. Tujuan utama dari pencegahan kecurangan dalam tata kelola dana desa adalah untuk menjaga aset keuangan desa tetap aman, memastikan penggunaannya berlangsung secara optimal dan selaras dengan sasaran yang telah dirancang, serta mempertahankan integritas hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Berbagai studi terdahulu telah meneliti dampak kompetensi aparatur, integritas moral, sistem pengawasan internal, serta budaya organisasi terhadap upaya pencegahan praktik kecurangan. (Susandya et al. 2022) Ditemukan bahwa perangkat desa yang memiliki kompetensi lebih tinggi biasanya menunjukkan kemampuan yang lebih unggul dalam menurunkan risiko terjadinya kecurangan (fraud). Dengan kata lain, pengetahuan dan keahlian yang memadai dapat menekan niat aparatur untuk melakukan penyimpangan. Namun demikian, hasil ini bertentangan dengan penelitian (Sinaga 2022) yang menunjukkan bahwa, jika dilihat secara terpisah, efektivitas aparat bukanlah faktor penentu dalam menghindari kecurangan dana desa. Oleh karena itu, tidak selalu tingkat keahlian seseorang berpengaruh langsung terhadap kemampuan mereka untuk menghindari kecurangan.

Studi yang dilakukan oleh (Damayanti 2016) menyatakan bahwa individu yang punya tingkatan moralitas tinggi cenderung lebih sadar akan dampak negatif dari kecurangan, sehingga lebih memilih untuk mengutamakan kepentingan masyarakat ketimbang keuntungan pribadi. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam melakukan penyimpangan akuntansi. Namun, (Siti Rodia, Ika Ardianni 2019) dalam penelitiannya menemukan hal yang berbeda: moralitas manajemen tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kecenderungan melakukan kecurangan. Hal tersebut disebabkan

oleh adanya rasionalisasi moral di lingkungan kerja, terutama di BPKAD Provinsi Riau

(Bahar, Hasanuddin, and Yusuf 2021) mengungkapkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang efektif mampu menekan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Sinaga 2022) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan dan parsial terhadap pencegahan kecurangan. Dengan kata lain, semakin optimal pelaksanaan sistem pengawasan, maka potensi terjadinya penyimpangan akan semakin menurun. Lebih lanjut, hasil studi dari (Febriansyah et al. 2023) memverifikasi bahwa langkah-langkah pencegahan kecurangan yang efektif dapat ditingkatkan dengan menumbuhkan budaya yang positif dan etis dalam organisasi. Namun, penelitian oleh Siti Rodia dan Ika Ardianni (2019) bertentangan dengan kesimpulan ini, dan menemukan bahwa budaya organisasi justru berkontribusi negatif terhadap kecurangan akuntansi.

Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti kapasitas aparatur desa, moralitas dan integritas personal, sistem kontrol internal, dan lingkungan budaya organisasi, semuanya memegang peranan penting dalam meminimalkan risiko fraud. Aparatur yang memiliki kemampuan yang mumpuni akan lebih siap dalam merancang sistem kontrol keuangan yang ketat, serta menciptakan suasana kerja yang menempatkan integritas sebagai nilai utama. Budaya organisasi yang dibangun atas dasar etika dan moral akan menciptakan atmosfer kerja yang mendorong perilaku jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, hubungan antara kompetensi, moralitas, dan budaya organisasi saling memperkuat dalam mendorong praktik tata kelola dana desa yang bersih dan bebas dari kecurangan. Harapannya, di masa depan, kasus fraud yang terjadi di sektor desa akan terus menurun.

## 2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pencegahan Fraud

fraud Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menipu, menggelapkan, atau menyalahgunkan, wewenang. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSA) No. 70 yang diterbitkan oleh IAI tahun 2021, *fraud* dapat diartikan sebagai perilaku yang menyebabkan penyajian informasi penting dalam laporan keuangan menjadi tidak akurat. Berdasarkan teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle) yang dikemukakan oleh Cressey pada tahun 1953, tindakan kecurangan dipicu oleh tiga elemen utama, yaitu adanya tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), serta pembenaran atau rasionalisasi (rationalization)

### Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah wujud nyata dari penerapan desentralisasi fiskal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dana tersebut dialokasikan untuk menunjang kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dengan berlandaskan pada asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaan dana sesuai peraturan dan kebutuhan masyarakat. Namun, lemahnya kompetensi dan moralitas aparatur serta sistem pengawasan yang belum optimal sering kali membuka peluang terjadinya *fraud*.

### Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi dapat dimaknai sebagai kapasitas individu dalam menggunakan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan (UU No. 13 Tahun 2003). Kompetensi seseorang merupakan cerminan dari pengetahuan, nilai, dan kemampuan memecahkan masalah, serta kemampuan berpikir dan berperilaku secara konsisten dan efektif Hutapea (2008)

H1: Kompetensi Aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

### Moralitas Aparatur

Haliah (2021) mengemukakan bahwa moralitas merupakan komitmen individu untuk bertindak sesuai dengan nilai kebenaran dan etika. Aparatur yang bermoral tinggi akan menghindari perilaku curang meskipun

memiliki kesempatan untuk melakukannya (Setiawati and Wahyudi 2020).
H2: Moralitas Aparatur desa berpengaruh siginifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

**Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal (SPI) merupakan proses sistematis yang melibatkan seluruh elemen organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan operasional, akuntabilitas laporan, dan kepatuhan hukum (COSO,2013). Dalam Konteks pemerintahan, SPI diimplementasikan melalui SPIP sebagaimana diatur dalam PP NO. 60 Tahun 2008.
H3: Sistem Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

**Budaya Organisasi**

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 118 Tahun 2010, budaya organisasi diartikan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, dan aturan yang menjadi pegangan bersama oleh seluruh anggota dalam suatu organisasi, Serta menjadi landasan dalam perilaku kerja dan pencapaian tujuan. Budaya Organisasi mencakup nilai, norma, dan keyakinan bersama yang membentuk perilaku anggota organisasi (Tobari 2015)
H4: Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

## 3. METODE PENELITIAN

Objek penelitian mencakup 13 desa yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada seluruh desa tersebut. Sampel penelitian terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, serta Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Data penelitian diperoleh melalui penyebaran angket kepada 91 orang partisipan. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner berbasis skala Likert dengan lima tingkatan penilaian, yaitu dari skor 1 yang menunjukkan "sangat tidak setuju" hingga skor 5 yang berarti "sangat setuju". Seluruh respons dari responden kemudian diolah melalui proses tabulasi dan dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda. Sebelum tahap pengujian hipotesis dilakukan, data terlebih dahulu melewati serangkaian uji kualitas, meliputi uji validitas, reliabilitas, serta uji terhadap asumsi klasik. Setelah semua persyaratan analisis terpenuhi, barulah dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t

Model penelitian diuji dengan memperhatikan indikator tiap-tiap pernyataan pada kuesioner. Variabel bebas Kompetensi Aparatur Desa ( *Knowledge, Skill, Attitude),* Moralitas Aparatur (Tingkat *Pre-Conventional* Tingkat *Conventional,Post- Conventional)* SPI (Lingkungan Pengendalian, penilaian risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Budaya Organisasi (Integritas dan Etika, Transparansi dan Keterbukaan, Pendidikan dan pelatihan) Variabel terikat yakni pencegahan *fraud* (Kepatuhan hukum dan regulasi, monitoring dan evaluasi, Partisipasi masyarakat) penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Bentuk persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$PF = \alpha + \beta_1 KA + \beta_2 MA + \beta_3 PI + \beta_4 BO + E$.....(1)

Dimana:

| | |
|---|---|
| PF | : Pencegahan *fraud* |
| $\alpha$ | : Constant |
| $\beta_1$ $\beta_2$ $\beta_3$ $\beta_4$ | : Koefisien Regresi |
| K*A* | : Kompetensi Aparatur |
| M*A* | : Moralitas Aparatur |
| PI | : Pengendalian Internal |
| BO | : Budaya Organisasi |
| *E* | : Error |

## 4. TEMUAN STUDI DAN PEMBAHASAN

**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Tabel 1. Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa | 91 | 24 | 30 | 27,84 | 1,845 |
| Kompetensi Apartur Desa | 91 | 20 | 30 | 27,58 | 2,300 |
| Moralitas Aparatur | 91 | 23 | 30 | 27,41 | 2,108 |
| Sistem Pengendalian Internal | 91 | 37 | 50 | 46,11 | 3,284 |
| Budaya Organisasi | 91 | 23 | 30 | 27,76 | 2,110 |
| Valid N (listwise) | 91 | | | | |

*Sumber: Data Diolah, 2025*

Di bawah ini adalah daftar semua variabel dan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standarnya yang ditunjukkan oleh statistik deskriptif:

a) Dalam hal pengelolaan dana desa, dimensi pencegahan kecurangan (Y) memiliki nilai antara 24 dan 30, dengan nilai tertinggi 30. Temuan studi menunjukkan nilai rata-rata 27,84 dengan standar deviasi 1,845. Perbandingan rata-rata dan standar deviasi menunjukkan bahwa penyebaran data stabil dan konsisten, dengan 91 responden memiliki standar deviasi yang lebih tinggi.
b) Untuk variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1), nilai minimum tercatat 20 dan maksimum 30. Rata-rata skor berada di angka 27,58 dengan standar deviasi 2,300. Kondisi ini mengindikasikan variasi data tergolong cukup baik karena nilai rata-rata masih lebih besar dibandingkan dengan simpangan baku, berdasarkan sampel sejumlah 91 responden

c) Pada variabel Moralitas Aparatur Desa (X2), didapatkan nilai terendah sejumlah 23 dan tertinggi 30. Rata-rata skor moralitas adalah 27,41 dengan simpangan baku 2,108. Jumlah responden sebanyak 91 orang menunjukkan penyebaran data yang cukup memadai karena rata-rata nilai masih di atas standar deviasi.
d) Variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) memiliki rentang nilai antara 37 sampai 50. Rata-rata nilai sistem pengendalian internal adalah 46,11 dengan standar deviasi 3,284. Dari 91 responden, data ini menggambarkan penyebaran yang memadai karena rata-rata nilai melebihi standar deviasi.
e) Variabel Budaya Organisasi (X4) mencatat nilai minimum 23 dan maksimum 30. Rata-rata skor budaya organisasi sejumlah 27,76 dan simpangan baku 2,110. Dengan jumlah responden sama, yaitu 91, Data tersebut memperlihatkan penyebaran yang baik dan konsisten karena nilai rata-ratanya melebihi simpangan baku.

**Uji Kualitas Data**
**Uji Validitas**

Penilaian Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa (Y) terdiri dari enam pertanyaan. Karena nilai Corrected Item-Total Correlation (r) masing-masing item lebih besar dari nilai r tabel sejumlah 0,1966, maka seluruh item dianggap valid berdasarkan hasil analisis validitas. Oleh karena itu, semua instrumen memenuhi persyaratan untuk pengumpulan data tahap berikutnya dalam hal ini. Pertanyaan-pertanyaan yang menilai X1 selanjutnya harus menjalani uji validitas.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (Y)

| No. Item Pertanyaan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Y1.1 | 0,607 | 0,1966 | Valid |
| Y1.2 | 0,600 | 0,1966 | Valid |
| Y1.3 | 0,626 | 0,1966 | Valid |
| Y1.4 | 0,667 | 0,1966 | Valid |
| Y1.5 | 0,675 | 0,1966 | Valid |
| Y1.6 | 0,511 | 0,1966 | Valid |

*Sumber: Data diolah, 2025*

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1)

| No. Item Pertanyaan | rhitung | rtabel | Keterangan |
|---|---|---|---|
| X1.1 | 0,632 | 0,1966 | Valid |
| X1.2 | 0,682 | 0,1966 | Valid |
| X1.3 | 0,649 | 0,1966 | Valid |
| X1.4 | 0,752 | 0,1966 | Valid |
| X1.5 | 0,772 | 0,1966 | Valid |
| X1.6 | 0,709 | 0,1966 | Valid |

*Sumber : Data diolah, 2025*

Keenam pertanyaan yang digunakan untuk mengukur X1 telah divalidasi. Karena nilai korelasi item-total yang diperoleh (r hitung) melampaui batas nilai r tabel sejumlah 0,1966, hasil pengujian menunjukkan bahwa semua pertanyaan valid. Oleh karena itu, kita dapat melanjutkan analisis dengan asumsi bahwa semua pertanyaan dalam aspek tersebut valid.

Selanjutnya, dilakukan uji validitas pada pertanyaan-pertanyaan yang merupakan bagian dari variabel Moralitas Aparatur (X2).

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Moralitas Aparatur (X2)

| No. Item Pertanyaan | rhitung | rtabel | Keterangan |
|---|---|---|---|
| X2.1 | 0,714 | 0,1966 | Valid |
| X2.2 | 0,719 | 0,1966 | Valid |
| X2.3 | 0714 | 0,1966 | Valid |
| X2.4 | 0,693 | 0,1966 | Valid |
| X2.5 | 0,671 | 0,1966 | Valid |
| X2.6 | 0,682 | 0,1966 | valid |

*Sumber : Data diolah, 2025*

Terdapat aspek Moralitas Aparatur Desa (X2), yang seluruh itemnya dinyatakan valid. Nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel sejumlah 0.1966 menunjukkan hal ini berlaku

untuk Korelasi Item-Total Terkoreksi. Oleh karena itu, kriteria validitas telah dipenuhi oleh semua item dalam aspek ini. Semua pertanyaan yang mengukur X3 juga tunduk pada uji validitas.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal (X3)

| No. Item pertanyaan | rhitung | rtabel | Keterangan |
|---|---|---|---|
| X3.1 | 0,539 | 0,1966 | Valid |
| X3.2 | 0,525 | 0,1966 | Valid |
| X3.3 | 0,620 | 0,1966 | Valid |
| X3.4 | 0,627 | 0,1966 | Valid |
| X3.5 | 0,665 | 0,1966 | Valid |
| X3.6 | 0,666 | 0,1966 | Valid |
| X3.7 | 0,717 | 0,1966 | Valid |
| X3.8 | 0,544 | 0,1966 | Valid |
| X3.9 | 0,701 | 0,1966 | Valid |
| X3.10 | 0,668 | 0,1966 | Valid |

*Sumber : Data diolah, 2025*

Sepuluh pertanyaan pengendalian internal (X3) yang digunakan untuk pengukuran telah divalidasi melalui pengujian. Nilai r hitung, yang mengukur korelasi item-total yang dikoreksi, lebih tinggi dari nilai r tabel sejumlah 0,1966, yang menunjukkan hal ini. Hasilnya, semua item dalam kategori ini valid. Pengujian reliabilitas dan validitas ukuran budaya organisasi (X4) juga telah selesai dilakukan.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Organisasi (X4)

| No.Item Pertanyaan | rhitung | rtabel | Keterangan |
|---|---|---|---|
| X4.1 | 0,787 | 0,1966 | Valid |
| X4.2 | 0,615 | 0,1966 | Valid |
| X4.3 | 0,716 | 0,1966 | Valid |
| X4.4 | 0,675 | 0,1966 | Valid |
| X4.5 | 0,663 | 0,1966 | Valid |
| X4.6 | 0,749 | 0,1966 | valid |

*Sumber : Data diolah, 2025*

Masing-masing dari enam pertanyaan yang membentuk penilaian Budaya Organisasi (X4) telah diuji validitasnya secara ketat dan terbukti valid. Karena nilai r hitung untuk Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari nilai r tabel sejumlah 0.1966, maka jelaslah bahwa hal ini terjadi. Oleh karena itu, semua pertanyaan dalam aspek ini dapat digunakan untuk tujuan penelitian.

**Uji Reabilitas**

Tabel 7. Hasil Uji Reabilitas

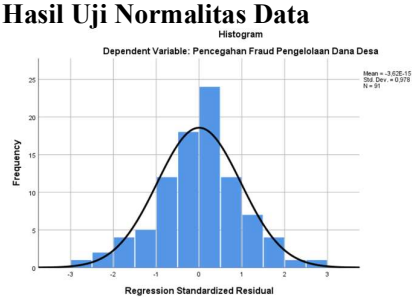
| No. | Variabel | Cronbachs Alpha | rtabel | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa (Y) | ,671 | 0.6 | Reliabel |
| 2. | Kompetensi Aparatur Desa (X1) | ,792 | 0.6 | Reliabel |
| 3. | Moralitas Aparatur (X2) | ,790 | 0.6 | Reliabel |
| 4. | Sistem Pengendalian Internal (X3) | ,828 | 0.6 | Reliabel |
| 5. | Budaya Organisasi (X4) | ,792 | 0.6 | Reliabel |

*Sumber : data diolah, 2025*

Reliabilitas yang tinggi dari instrumen penelitian ini ditunjukkan oleh setiap pertanyaan yang memiliki nilai Cronbachs Alpha lebih besar dari 0,6. Budaya Organisasi (X4), Sistem Pengendalian Internal (X3), Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa (Y), dan Kompetensi Aparatur Desa (X1) memiliki nilai Cronbachs Alpha masing-masing sejumlah 0.792, 0.790, 0.828, dan 0.828. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa instrumen ini merupakan alat yang dapat dipercaya dan diandalkan untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti, karena seluruh itemnya telah memenuhi syarat reliabilitas yang ditentukan.

**Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik**

**Hasil Uji Normalitas Data**




*Sumber : Data diolah,2025*

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Histogram yang dihasilkan menunjukkan bahwa kurva residu berbentuk kurva lonceng, bukan garis lurus. Semua tanda menunjukkan bahwa Temuan studi ini terdistribusi secara normal.

Seperti yang akan dibahas lebih rinci nanti, temuan uji normalitas memakai metode One Sample Kolmogorov-Smirnov menguatkan penemuan ini.

Tabel 8. Hasil Uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*

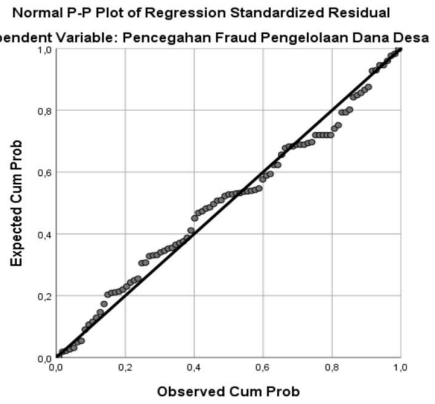
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 91 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | ,98939399 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,078 |
| | Positive | ,078 |
| | Negative | -,061 |
| Test Statistic | | ,078 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200[c,d] |

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

*Sumber: Data diolah, 2025*

Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sejumlah 0,200. Karena nilai tersebut melebihi 0,05, maka residual model regresi dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, data memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.




*Sumber: Data diolah, 2025*

Gambar 2. Diagram *Norma P-P Plot Of Regression Standardized Residual*

Titik-titik residual hampir sejajar dengan garis diagonal pada grafik Normal P-P Plot di atas. Distribusi residual mendekati normal jika mengikuti pola ini. Dengan demikian, hasil uji menunjukkan residual berdistribusi normal, sehingga data dinilai memenuhi syarat normalitas

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Cobalah untuk menemukan satu set variabel independen yang sangat berkorelasi dalam analisis regresi. Jika nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, maka dapat dikatakan bahwa model tersebut tidak menunjukkan adanya multikolinieritas. Output SPSS untuk uji multikolinearitas adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

**Coefficients[a]**

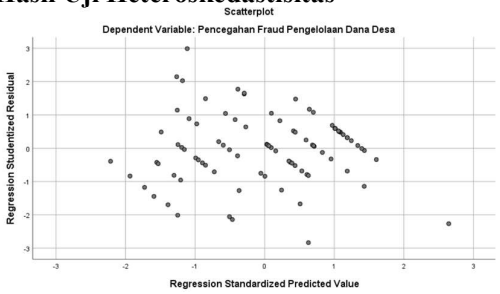
| Model | | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | Kompetensi Apartur Desa | ,674 | 1,483 |
| | Moralitas Aparatur | ,637 | 1,570 |
| | Sistem Pengendalian Internal | ,886 | 1,128 |
| | Budaya Organisasi | ,700 | 1,429 |

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

*Sumber: Data Diolah, 2025*

X1 yang mewakili kompetensi aparatur desa memiliki nilai tolerance sejumlah 0,674 berdasarkan uji multikolinearitas, sedangkan X2 yang mewakili moralitas aparatur memiliki nilai tolerance sejumlah 0,637. Toleransi untuk Sistem Pengendalian Internal (X3) adalah 0,886, sedangkan untuk Budaya Organisasi (X4) adalah 0,700. Tampaknya tidak ada masalah dengan multikolinearitas dalam model, karena semua nilai Tolerance lebih tinggi dari batas minimum 0,10. Nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk X1, X2, X3, dan X4 secara signifikan lebih rendah dari batas maksimum yang diizinkan: masing-masing 1,483, 1,570, 1,128, dan 1,429. Model regresi penelitian ini memenuhi semua asumsi klasik yang disyaratkan dan bebas dari masalah multikolinearitas, sesuai dengan hasilnya.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**




*Sumber: Data diolah, 2025*

Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Pada diagram pencar, titik-titik data tampak tersebar acak di sekitar garis nol pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu. Pola sebaran tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Artinya, varians residual relatif konstan di setiap observasi. Dengan kondisi tersebut, model regresi dinilai memenuhi asumsi homoskedastisitas dan dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Tabel 10. Tabel Regresi Linier Berganda

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients B | Unstandardized Coefficients Std. Error | Standardized Coefficients Beta | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Constant) | 16,635 | 1,959 | | 8,493 | ,000 |
| | Kompetensi Apartur Desa | -,507 | ,056 | -,632 | -8,978 | ,000 |
| | Moralitas Aparatur | ,488 | ,063 | ,557 | 7,692 | ,000 |
| | Sistem Pengendalian Internal | -,091 | ,035 | -,161 | -2,630 | ,010 |
| | Budaya Organisasi | ,576 | ,060 | ,659 | 9,536 | ,000 |

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

*Sumber: Data diolah, 2025*

Koefisien regresi sejumlah 0,488 ditemukan untuk variabel Moralitas Aparatur (X2) dan koefisien regresi sejumlah -0,507 untuk variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1). Budaya Organisasi (X4) memiliki koefisien sejumlah 0,576 dan Sistem Pengendalian Intern (X3) memiliki koefisien sejumlah -0,091. Pada model regresi ini, 16,635 merupakan nilai konstanta. Berikut adalah rumus persamaan regresi linier berganda yang diturunkan dari hasil tersebut:

$$\mathbf{Y = 16,635 - 0,507X_1 + 0,488X_2 - 0,09X_3 + 0,0576X_4 + e}$$

Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai Pencegahan Kecurangan (Y) diprediksi sejumlah 16,635 ketika semua faktor independen (X1 sampai dengan X4) bernilai nol. Koefisien negatif sejumlah -0,507 untuk faktor Kompetensi Aparatur Desa (X1) mengindikasikan bahwa nilai Y menurun seiring dengan meningkatnya kompetensi aparatur. Koefisien positif sejumlah 0,488 untuk Moralitas Aparatur (X2) mengindikasikan bahwa terdapat korelasi positif antara moralitas aparatur yang tinggi dengan peningkatan upaya pencegahan kecurangan. Terdapat korelasi negatif antara X3 (Sistem Pengendalian Internal) dengan Y (koefisien regresi = -0,091). Pada saat yang sama, koefisien positif sejumlah 0,576 untuk Budaya Organisasi (X4) menunjukkan bahwa upaya pencegahan kecurangan didukung oleh budaya organisasi yang kuat.

**Hasil Uji Hipotesis**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi ($R^2$)**

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi ($R^2$)

**Model Summary[b]**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ,844[a] | ,713 | ,699 | 1,012 |

a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi , Sistem Pengendalian Internal , Kompetensi Apartur Desa, Moralitas Aparatur

b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

*Sumber: Data diolah, 2025*

Dengan R-squared sejumlah 0,713 dan Adjusted R-squared sejumlah 0,699, variabel kompetensi aparatur desa (X1), moralitas aparatur (X2), sistem pengendalian internal (X3), serta budaya organisasi (X4) mampu menjelaskan 69,9% variasi dalam pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa, sedangkan 30,1% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Variabel pencegahan kecurangan bertindak sebagai variabel dependen, sementara keempat variabel independen menunjukkan hubungan positif (nilai korelasi berganda sejumlah 0,844 ditunjukkan pada tabel 4.13).

**Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)**

Tabel 12. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients B | Unstandardized Coefficients Std. Error | Standardized Coefficients Beta | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Constant) | 16,635 | 1,959 | | 8,493 | ,000 |
| | Kompetensi Apartur Desa | -,507 | ,056 | -,632 | -8,978 | ,000 |
| | Moralitas Aparatur | ,488 | ,063 | ,557 | 7,692 | ,000 |
| | Sistem Pengendalian Internal | -,091 | ,035 | -,161 | -2,630 | ,010 |
| | Budaya Organisasi | ,576 | ,060 | ,659 | 9,536 | ,000 |

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

*Sumber: Data diolah, 2025*

Analisis menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa (X1) memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap upaya pencegahan kecurangan, dengan nilai t sejumlah -8,978 dan tingkat signifikansi 0,000. Artinya, peningkatan kompetensi justru diikuti oleh penurunan efektivitas dalam mencegah kecurangan. Sebaliknya, moralitas aparatur (X2) memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud (t = 7,692; sig. = 0,000), demikian pula budaya organisasi (X4) yang juga menunjukkan hubungan positif dan signifikan (t = 9,536; sig. = 0,000). Kedua variabel ini mengindikasikan semakin meningkat tingkat moralitas dan kekuatan budaya organisasi, maka semakin kuat pula langkah-langkah pencegahan terhadap tindakan fraud. Sementara itu, sistem pengendalian internal (X3) memperlihatkan pengaruh negatif yang tetap memiliki signifikansi secara statistik.

(t = -2,630; sig. = 0,010), mengisyaratkan bahwa peningkatan kontrol internal belum tentu berdampak positif dalam mencegah tindakan kecurangan.

**Uji signifikansi Simultan (Uji-F)**

Tabel 13. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 218,426 | 4 | 54,607 | 53,304 | ,000[b] |
| | Residual | 88,101 | 86 | 1,024 | | |
| | Total | 306,527 | 90 | | | |

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi , Sistem Pengendalian Internal , Kompetensi Apartur Desa, Moralitas Aparatur

*Sumber: Data diolah, 2025*

Pada analisis varians (ANOVA), nilai F hitung sejumlah 53,304 lebih tinggi dari nilai F tabel sejumlah 2,47, dan nilai signifikansi sejumlah 0,000 yang lebih rendah dari ambang batas 0,05. Dengan terpenuhinya persyaratan ini, maka hipotesis H5 dapat diterima. Upaya pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi dan moralitas penyelenggara, serta sistem pengendalian intern dan budaya organisasi.

**Pembahasan**

**Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan fraud Pengelolaan Dana desa.**

Temuan studi menunjukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Kompetensi yang tidak disertai moralitas dan budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan peluang kecurangan. Berdasarkan teori *fraud Triangle (Cressey,* 1953*)* kompetensi aparatur berkaitan dengan elemen opportunity (Peluang). Aparatur yang kompoten tetapi tidak berintegritas justru memiliki peluang lebih besar untuk melakukan *fraud,* karena mereka memahami celah sistem dan manipuasi aturan.

Hasil penelitian ini menunjukkan arah yang berlawanan dengan temuan (Sinaga 2022), yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak memiliki pengaruh parsial terhadap upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

**Pengaruh Moralitas Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa**

Moralitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud.* Temuan ini sejalan dengan teori *fraud triangle* yang menerangkan jika seseornag mempunyai moralitas yang tinggi lebih condong mempunyai pemahaman yang lebih baik nterkait etika dan moralitas sehingga mereka cenderung untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari perilaku yang tak etis serta melanggar hukum. Dengan demikian adanya individu yang tidak rasional terhadap tindakan kecurangan dapat mendukung pencegahan *fraud* di lingkungan kerja pemerintah desa Asril et al., (2024).

Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Siti Rodiah et al., (2019) yang membuktikan bahwa moralitas manajemen tidak mempunyai pengaruh terhadapa kecurangan akuntansi.

**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan fraud Pengelolaan Dana Desa**

Pengendalian internal terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil ini konsisten dengan konsep *fraud triangle* yang diperkenalkan oleh Cressey pada tahun 1953, di mana salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya kecurangan adalah adanya kesempatan (*opportunity*), yakni situasi yang memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan maupun menyembunyikan tindakan tidak jujur. Kondisi tersebut umumnya muncul akibat lemahnya pengendalian internal, kurangnya sistem pengawasan, atau adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, Temuan studi ini berlawanan dengan temuan Gilang Noor Alamsyah (2017) yang menyatakan bahwa aktivitas pengendalian tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh masih adanya aparatur yang belum memahami secara mendalam tujuan dan pentingnya pelaksanaan kegiatan pengendalian tersebut.

**Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan dana Desa**

Temuan studi ini dijelaskan melalui Teori Segitiga dalam konteks budaya organisasi yang efektif, yang ditandai oleh adanya komunikasi tujuan antarpegawai, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, serta penerapan sanksi terhadap perilaku tidak etis. Unsur-unsur tersebut memperkuat upaya pencegahan kecurangan (fraud) dengan meminimalkan kesempatan, peluang, dan rasionalisasi.

Sebaliknya, hasil ini bertentangan dengan penelitian (Siti Rodia, Ika Ardianni 2019) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi justru memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya kecurangan akuntans.

## 5. SIMPULAN

Setelah menjalankan angka-angka melalui SPSS versi 26, kami menemukan bahwa X1, variabel Kompetensi Aparatur Desa, secara signifikan menghambat upaya kami untuk menjaga dana desa aman dari penyelewengan. Nilai t-hitung sejumlah -8,978 dan tingkat signifikansi sejumlah 0,000-jelas lebih rendah dari batas 0,05-membuktikan hal ini. Hal ini mendukung pendapat (Sugiyono 2024) yang menyatakan bahwa meningkatkan tingkat pendidikan dan pelatihan bagi aparat desa dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan.

Sementara itu, Moralitas Aparatur (X2) memiliki dampak yang baik dan signifikan secara statistik (t = 7,692, p = 0,000). Situasi ini menunjukkan bahwa moralitas aparatur yang baik dapat mendorong perilaku etis dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Selain itu, Sistem Pengendalian Internal (X3) menunjukkan dampak negatif yang substansial, dengan t-hitung sejumlah -2,630 dan tingkat signifikansi 0,010. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pengendalian internal sangat penting dalam memitigasi peluang kecurangan.

Selain itu, dengan nilai t-hitung sejumlah 9,536 dan signifikansi sejumlah 0,000, Budaya Organisasi (X4) secara signifikan berdampak positif terhadap upaya pencegahan kecurangan. Tampaknya budaya organisasi yang kuat dapat secara efektif mencegah praktik-praktik kecurangan dengan menumbuhkan suasana yang kondusif untuk pekerjaan yang produktif.

Singkatnya, pencegahan kecurangan dipengaruhi secara signifikan oleh analisis simultan dari keempat variabel tersebut. Nilai F sejumlah 53,304, yang secara statistik signifikan pada tingkat 0,000, yang lebih rendah dari batas kritis 0,05. Lebih lanjut, keempat variabel tersebut diperkirakan menjelaskan sekitar 69,9% dari variasi upaya pencegahan kecurangan, dengan sisanya sejumlah 30,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diperhitungkan dalam model analisis ini (seperti yang ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square sejumlah 0,699).

Temuan ini mendukung argumen bahwa Pemerintah Desa Gunung Megang harus memberikan pelatihan berkelanjutan dalam manajemen proyek desa, teknologi informasi, dan manajemen keuangan untuk meningkatkan kapasitas aparatur. Selain itu, untuk menegakkan integritas pribadi dan profesional, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap moralitas pegawai. Audit internal, sistem pengawasan berdasarkan data digital, dan kebijakan pengawasan yang lebih ketat dapat membantu memperkuat sistem pengendalian internal saat ini. Selain itu, pelatihan moral, sosialisasi nilai-nilai organisasi, dan pemberian contoh dari para pemimpin merupakan cara yang baik untuk membantu karyawan menginternalisasi prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, akuntabilitas, dan integritas, yang pada gilirannya akan memperkuat budaya organisasi.

Pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan, termasuk kemampuan untuk menangkap variabel-variabel baru yang tidak teridentifikasi dalam pendekatan kuantitatif, dapat dicapai melalui penggunaan pendekatan kualitatif, seperti wawancara mendalam, yang harus dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

Bahar, A., H. Hasanuddin, and A. Yusuf. 2021. "Transparansi Birokrasi Melalui Pemanfaatan SIMPEG." *Jurnal Administrasi Publik* 9(2):112–23.

Damayanti, D. N. S. 2016. "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Terhadap Praktik Kecurangan

Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Pegawai Bagian Keuangan Dan Akuntansi Di Yogyakarta." Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Dewi, R. 2017. *Fraud: Penyebab Dan Cara Pencegahannya*. Bandung: Alfabeta.

Febriansyah, Aulia Darmaputri Savitri, Elfira Vathia Khairunnisa, and Andriyani. 2023. "The Effect of Ethical Leadership on Organizational Citizenship Behavior and Turnover Intention with Intrinsic Motivation as a Mediating Variable a Study of Companies in the Trade and Services Sector." *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)* 11(11):5352–64. doi: 10.18535/ijsrm/v11i11.em08.

Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus Dan Penerapan Untuk HR Dan Organisasi Yang Dinamis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Indonesia, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik. 2025. "Beranda."

Setiawati, Neng, and Satya Wahyudi. 2020. "Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Batanghari." *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10(2):85–92.

Sinaga, E. P. 2022. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Keadilan Organisasi, Kompetensi Aparatur, Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 10(1):103–12. doi: 10.37641/jiakes.v10i1.1208.

Siti Rodia, Ika Ardianni, Aftania Herlina. 2019. "Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaantan Aturan Akuntansi, Moralitas Manajemen, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Akuntansi." *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika Vol.9 No.1*.

Sugiyono. 2024. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susandya, A. A. P. G. B. A., M. D. Permana Putra, I. K. Bagiana, M. R. Cahyani, and I. A. P. M. Aristanti. 2022. "Faktor-Faktor Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 12(3):659–71. doi: 10.22219/jrak.v12i3.22363.

Tobari. 2015. *Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish.

Widyawati, N. P. A., E. Sujana, and G. Yuniarta. 2019. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bumdesa." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*.